



RENCANA KERJA (RENJA) 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



2023



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 36 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 22);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2000-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dan mengacu pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran RPJMD untuk waktu pelaksanaan Tahun 2023.
- (3) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
 - a. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 - b. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (4) Kepala BAPPELITBANGDA menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan RKPD Tahun 2023.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun Anggaran 2023 memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan
 - d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi CoronaVirus Disease (COVID-19) di daerah.

- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII	PENUTUP

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah bersama DPRD menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Tahun 2023.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RKA-PD Tahun 2023 dengan DPRD.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kerja masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (2) Laporan kinerja bentuk pengendalian dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
- perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 6 Juli 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 6 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**


SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022 NOMOR
36**

KATA PENGANTAR

Rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Isi dari rencana kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 – 2023.

Dalam penyusunannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Demikian Renja Tahun 2023 ini disusun dengan harapan penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 berlangsung dengan tertib, lancar dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan bersama.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN 1
I.1	Latar Belakang 1
I.2	Landasan Hukum 2
I.3	Maksud dan Tujuan 3
I.4	Sistematika Penulisan 4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 5
II.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah 5
II.2	Analisis Kinerja pelayanan 12
II.3	Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD 14
II.4	Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD 15
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 24
III.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 24
III.2	Tujuan Renja Bapenda 24
III.3	Sasaran Renja Bapenda 25
III.4	Program dan Kegiatan 25
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 32
BAB V	PENUTUP 37

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Suatu Kegiatan harus dilandasi oleh kekuatan Hukum agar supaya kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai validitas yang kuat. Adapun Landasan Hukum dalam Penyusunan Renja adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan, pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 , Nomor 26)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Negara Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019 Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

I.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah :

1. Pelaksanaan pelayanan perangkat daerah
2. Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan
3. Penyusunan rencana anggaran perangkat daerah

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian ini dijelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran perangkat daerah, program dan kegiatan perangkat daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini memuat seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaannya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Evaluasi Renja SKPD) Tahun 2021 merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator input dan output sebagaimana telah tertuang pada dokumen Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD secara umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2021.

Adapun keberhasilan suatu proses perencanaan akan dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak pada capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD, bahan evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra 2018-2023 dapat dilihat pada tabel T.C 29

T.C 29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2022
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Nama SKPD : Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 -2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2022) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2019 s/d 2023		Capaian
					Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)	12
..01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	% 100	person	100 %	100 %	100%	100 %	67 %		
..01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	% 100	person	100 persen	100 persen	100%	100 %	67 %		
..01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA, DPPA)	Dok 6	Dok	2 Dok	1.00 Dok	50%	2 Dok	3 Dok	50%	
..01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renstra, Renja)	Lap. 6	Lap.	2 Lap.	1.00 Lap.	50%	2 Lap.	3 Lap.	50%	
..01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan money)	Lap 12	Lap	4 Lap	2.00 Lap	50%	4 Lap	6 Lap	50%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 -2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2022) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2019 s/d 2023		Capaian
					Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/4)	12
..01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	persen 100	persen	100 persen	100 persen	100%	100 %	67 %		
..01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan 36	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	67%	
..01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu pelaksanaan administrasi tugas ASN	Bulan 36	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	67%	
..01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap 3	Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	2 Lap	67%	
..01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lap 6	Lap	2 Lap	2 Lap	100%	4 Lap	6 Lap	100%	
..01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Lap 3	Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	2 Lap	67%	
..01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi penerimaan retribusi pasar	persen 100	persen	100 %	104 %	104%	100 %	68 %		
..01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi Daerah Yang Terdata dan Terdaftar	Objek Retribusi 11820	Objek Retribusi	3750 Retribusi	4398 Retribusi	117%	3937 Objek Retribusi	8,335 Retribusi	71%	
..01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	Bulan 36	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	67%	
..01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah SKRD Yang Dicitak	Lembar 11820	Lembar	4398 Lembar	4627 Lembar	105%	3937 Lembar	8,564 Lembar	72%	
..01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Retribusi Daerah	Laporan 6	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	0 -	2 -	33%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 -2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2022) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2019 s/d 2023		Capaian
					Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/4	12
..01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	persen 100	100 persen	100 %	100 %	100%	100 %	100 %		
..01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	Buah 900	Buah	298 Buah	298 Buah	100%	220 Buah	518 Buah	58%	
..01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	Buah 1110	Buah	353 Buah	353 Buah	100%	440 Buah	793 Buah	71%	
..01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia	Blok 39391	Blok	13744 Blok	13594 Blok	99%	13900 Blok	27,494 Blok	70%	
..01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tersedia	Eksemplar 144	Eksemplar	48 Eksemplar	24 Eksemplar	50%	252 Eksemplar	276 Eksemplar	192%	
..01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali 300	60 Kali	60 Kali	60 Kali	100%	60 Kali	180 Kali	60%	
..01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persen 100	persen	100 %	100 %	100%	100 %	67 %		
..01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan	Unit 95	Unit	35 Unit	35 Unit	100%	30 Unit	65	68%	
..01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit 3	Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2	67%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 -2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2022) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2019 s/d 2023		Capaian
					Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/4	12
..01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit 57	Unit	19 Unit	19 Unit	100%	15 Unit	34	60%	
..01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen 100	persen	100 persen	100 %	100%	100 %	67 %		
..01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang bermaterai	Lembar 1200	Lembar	355 Lembar	355 Lembar	100%	250 Lembar	605 Lembar	50%	
..01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan 36	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	67%	
..01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan 36	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	67%	
..01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam baik	persen 100	persen	100 %	100 %	100%	100 %	67 %	67%	
..01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan STNK Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit 78	Unit	26 Unit	26 Unit	100%	26 Unit	52 Unit	67%	
..01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit 6	Unit	5 Unit	5 Unit	100%	2 Unit	7 Unit	117%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 -2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2022) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2019 s/d 2023		Capaian
					Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)	12
..01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit 150	Unit	40 Unit	40 Unit	100%	50 Unit	90 Unit	60%	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah & retribusi daerah yang dikelola Bapenda	persen 100	%	100 %	105 %	105%	100 %	68 %		
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	persen 100	%	100 %	104 %	104%	100 %	68 %		
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah objek pajak baru yang terdata	Objek pajak baru 600	Objek pajak baru	194 Objek pajak baru	194 Objek pajak baru	100%	200 Objek pajak baru	394 Objek pajak baru	66%	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah perda / perbub yang tersusun	Dok 15	Dok	5 Dok	5 Dok	100%	5 Dok	10 Dok	67%	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah petugas & wajib pajak yang mendapat penyuluhan	Orang 300	Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	200 Orang	67%	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi yang tersedia	Aplikasi 4	Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%	1 Aplikasi	3 Aplikasi	75%	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak daerah yang terdata dan terdaftar	Objek pajak 22587	Objek pajak	5511 Objek pajak	5511 Objek pajak	100%	7529 Objek pajak	13,040 Objek pajak	58%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 -2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2022) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2019 s/d 2023		Capaian
					Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)	12
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah aplikasi basis data pajak daerah yang dipelihara	Aplikasi 6	Aplika si	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%	2 Aplikasi	5 Aplikasi	83%	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak PBB dan BPHTB yang termutakhirkan datanya	Objek pajak 102000	Objek pajak	51765 Objek pajak	51765 Objek pajak	100%	34000 Objek pajak	85,765 Objek pajak	84%	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang ditetapkan	Wajib pajak 782124	Wajib pajak	42896 Wajib pajak	42896 Wajib pajak	100%	0 Wajib pajak	42,896 Wajib pajak	5%	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Waktu penyediaan layanan dan konsultasi pajak	Bulan 36	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	67%	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang diteliti dan diverifikasi	Dok 23967	Dok	11181 Dok	11181 Dok	100%	7989 Dok	19,170 Dok	80%	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang tertagih	Wajib pajak 780000	Wajib pajak	500000 Wajib pajak	500000 Wajib pajak	100%	260000 Wajib pajak	760,000 Wajib pajak	97%	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan pajak daerah	Laporan 12	Lapor an	4 Lapora n	4 Lapora n	100%	4 Laporan	8 Lapora n	67%	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan retribusi daerah	Laporan 12	Lapor an	4 Lapora n	4 Lapora n	100%	4 Laporan	8 Lapora n	67%	

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Secara umum dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator sasaran yang mencapai target yang diharapkan. Di sisi lain, keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing bidang. Pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel T.C 30

TC. 30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023
					-								
1	Persentase tercapainya penerimaan pajak & retribusi daerah			-	85%	-	-	-	126.41%	-	-	-	
2	Persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD			-	-	27.93%	27.06%	29.15%	-	33.52%	27.06%	29.15%	
3	Persentase kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD			-	-	4.26%	3.59%	3.36%	-	4.70%	3.59%	3.36%	

II. 3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 5 tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas pokok, Fungsi, uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan daerah, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Badan pendapatan Daerah kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, transparansi, partisipatif dan akuntabel yang didukung oleh aparat yang profesional. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah selaku pengelola pendapatan daerah berbagai permasalahan dihadapi berikut daftar permasalahan yang dihadapi di seluruh bidang SKPD Bapenda:

1. Tidak tercapainya target penerimaan PAD
2. Penagihan dan pengawasan pada penerimaan pajak dan retribusi daerah belum dilakukan secara insentif
3. Belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan operasional dalam peningkatan pendapatan
4. Belum optimalnya penerimaan pajak dan retribusi yang didukung oleh sarana IT (belum terintegrasi dan belum online)
5. Kurangnya Sumber Daya Manusia

6. Kurangnya literasi masyarakat, wajib pajak dan wajib retribusi serta stakeholder terkait pajak daerah dan retribusi daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan berbagai permasalahan yang dihadapi di atas maka Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2023 memiliki strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan literasi masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi serta stakeholder terkait pajak daerah dan retribusi
2. Mengoptimalkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
3. Melakukan riview atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah
4. Melakukan pendataan potensi pendapatan asli daerah, khususnya yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan, BPHTB, Mineral Bukan Logam dan Batuan
5. Meningkatkan manajemen Pendapatan Asli Daerah
6. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
7. Meningkatkan koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan;
8. Menyediakan alternatif kanal pembayaran pajak dan retribusi secara *online*
9. Membentuk Satgas khusus terkait yang bertanggung jawab untuk proses pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah.
10. Meningkatkan Kompetensi Petugas Pajak dan Retribusi Daerah
11. Membangun sistem / aplikasi yang terintegrasi penerimaan pendapatan daerah

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan,

tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program /kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel T.C31

TC.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian		Pagu Indukatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian		Pagu Indukatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100	%	14,535,844,500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100	%	12,814,085,800	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100	persen	48,854,900	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100	persen	48,854,900	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA, DPPA)	2	dokumen	25,317,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA, DPPA)	2	dokumen	25,317,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renstra, Renja)	2	Laporan	21,375,900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renstra, Renja)	2	Laporan	21,375,900	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan money)	4	laporan	2,162,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan money)	4	laporan	2,162,000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Catatan Penting	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	100	perse n	11,788,593,900	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	100	perse n	10,066,835,200	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	11,689,750,700	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	9,967,992,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Waktu pelaksanaan administrasi tugas ASN	12	bulan	94,975,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu pelaksanaan administrasi tugas ASN	12	bulan	94,975,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lapor an	1,458,200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lapor an	1,458,200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Lapor an	1,558,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Lapor an	1,558,000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Lapor an	852,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Lapor an	852,000	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi penerimaan retribusi pasar	91	perse n	367,952,300	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi penerimaan retribusi pasar	100	perse n	367,952,300	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Jumlah Objek Retribusi Daerah Yang Terdata dan Terdaftar	3937	objek retrib usi	294,132,200	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi Daerah Yang Terdata dan Terdaftar	3937	objek retrib usi	294,132,200	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Catatan Penting
	Pengolahan Data Retribusi Daerah		Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	12 Bulan	23,410,700	Pengolahan Data Retribusi Daerah		Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	12 Bulan	23,410,700	
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah		Jumlah SKRD Yang Dicetak	3937 Lembar	-	Penetapan Wajib Retribusi Daerah		Jumlah SKRD Yang Dicetak	3937 Lembar	50,409,400	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Retribusi Daerah	2 Laporan	50,409,400	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Retribusi Daerah	2 Laporan	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100 persen	647,197,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100 persen	647,197,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	300 buah	9,131,400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	220 buah	9,131,400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	370 Buah	12,969,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	440 Buah	12,969,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia	13130 Blok	163,760,600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia	13900 Blok	163,760,600	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Tersedia	48 eksemplar	2,520,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Tersedia	252 eksemplar	2,520,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Kali	458,816,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Kali	458,816,000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian		Pagu Indukatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian		Pagu Indukatif	Catatan Penting
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	32,015,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	32,015,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	-		-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	-		-	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel Yang Diadakan	30	Unit	20,190,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel Yang Diadakan	30	Unit	20,190,000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19	Unit	11,825,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15	Unit	11,825,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	1,350,497,400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	1,350,497,400	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah dokumen yang bermaterai	400	lembar	3,996,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah dokumen yang bermaterai	250	lembar	3,996,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	160,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	160,000,000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian		Pagu Indukatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian		Pagu Indukatif	Catatan Penting
	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah wajib pajak yang ditetapkan	260708	wajib pajak	-	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah wajib pajak yang ditetapkan	260708	wajib pajak	-	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Waktu penyediaan layanan dan konsultasi pajak	12	bulan	71,497,000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Waktu penyediaan layanan dan konsultasi pajak	12	bulan	71,497,000	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang diteliti dan diverifikasi	7989	dok	11,960,700	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang diteliti dan diverifikasi	7989	dok	11,960,700	
	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah wajib pajak yang tertagih	260000	wajib pajak	196,192,900	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah wajib pajak yang tertagih	260000	wajib pajak	196,192,900	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah laporan hasil pemeriksaan pajak daerah	4	laporan	269,485,300	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah laporan hasil pemeriksaan pajak daerah	4	laporan	269,485,300	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah laporan hasil pemeriksaan retribusi daerah	4	laporan	172,856,200	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah laporan hasil pemeriksaan retribusi daerah	4	laporan	172,856,200	
TOTAL						20,151,240,000							20,729,481,300

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian		Pagu Indukatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian		Pagu Indukatif	Catatan Penting
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	100	persen	5,615,395,500	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	100	persen	7,915,395,500	
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Jumlah objek pajak baru yang terdata	200	objek pajak baru	37,512,000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Jumlah objek pajak baru yang terdata	200	objek pajak baru	37,512,000	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah perda / perbub yang tersusun	5	dok	154,488,000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah perda / perbub yang tersusun	5	dok	154,488,000	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah petugas & wajib pajak yang mendapat penyuluhan	100	orang	109,680,000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah petugas & wajib pajak yang mendapat penyuluhan	100	orang	109,680,000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah aplikasi yang tersedia	1	Aplikasi	128,885,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah aplikasi yang tersedia	1	Aplikasi	2,428,885,000	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah objek pajak daerah yang terdata dan terdaftar	7529	objek pajak	64,997,700	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah objek pajak daerah yang terdata dan terdaftar	7529	objek pajak	64,997,700	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah aplikasi basis data pajak daerah yang dipelihara	3	aplikasi	44,330,500	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah aplikasi basis data pajak daerah yang dipelihara	2	paket	44,330,500	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah objek pajak PBB dan BPHTB yang termutakhirkan datanya	34000	objek pajak	4,353,510,200	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah objek pajak PBB dan BPHTB yang termutakhirkan datanya	34000	objek pajak	4,353,510,200	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian		Pagu Indukatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian		Pagu Indukatif	Catatan Penting
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	Bulan	1,186,501,400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	Bulan	1,186,501,400	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100	perse n	300,734,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100	perse n	300,734,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan STNK Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26	Unit	130,526,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan STNK Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26	Unit	130,526,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Unit	130,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Unit	130,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50	unit	40,208,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50	unit	40,208,000	
	PROGRAM 2 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase realisasi penerimaan pajak daerah & retribusi daerah yang dikelola Bapenda	100	perse n	5,615,395,500	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase realisasi penerimaan pajak daerah & retribusi daerah yang dikelola Bapenda	100	perse n	7,915,395,500	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai tugas dan fungsi serta peran kemendagri sebagai poros pemerintahan dan politik dalam negeri, penegakan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa, dengan melaksanakan pelayanan public serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka kebijakan dan strategi Kemendagri dalam lima tahun kedepan diarahkan untuk mendukung perwujudan 5 (lima) program prioritas pembangunan nasional tahun 2019-2024. Adapun kelima program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pembangunan infrastruktur
3. Penyederhanaan regulasi
4. Reformasi birokrasi
5. Transformasi ekonomi.

III. 2 TUJUAN RENJA BAPENDA

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menuangkan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk mempertajam fokus pelaksanaan visi organisasi yaitu dengan merumuskan tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perencanaan strategis 2021-2023 adalah meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak & retribusi daerah.

III. 3 SASARAN RENJA BAPENDA

Sasaran merupakan target spesifik dari suatu tujuan yang ingin dicapai, dihasilkan dan diwujudkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas..

Sasaran Badan Pendapatan Daerah berdasarkan rumusan yang masih sesuai dengan rumusan sasaran yang ada di dalam renstra adalah sebagai berikut :

- a. Penyempurnaan landasan hukum yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah
- b. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak / retribusi akan pentingnya penerimaan pajak / retribusi untuk pembangunan
- c. Pendataan potensi Pendapatan Asli Daerah
- d. Tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah

III. 4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam rangka kerja sama dengan masyarakat.

Adapun Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Renja Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan kabupaten/kota, terdiri dari 8 kegiatan, yaitu:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Pendapatan, terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :

a. Pengelolaan pendapatan Daerah

Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan dapat dilihat pada tabel T.C 33.

Kode	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023					CATAT AN PENTI NG	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDUKATIF	SUMBE R DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDUKATIF
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
5.02.04.2.0 1.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi yang tersedia	Pangkajene Sidrap	1	Aplikasi	2,428,885,000	APBD		1	Aplikasi	139,961,000
5.02.04.2.0 1.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak daerah yang terdata dan terdaftar	Pangkajene Sidrap	7529	objek pajak	64,997,700	APBD		7529	objek pajak	19,980,000
5.02.04.2.0 1.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah aplikasi basis data pajak daerah yang dipelihara	Pangkajene Sidrap	2	paket	44,330,500	APBD		3	aplikasi	144,655,000
5.02.04.2.0 1.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak PBB dan BPHTB yang termutakhirkan datanya	Pangkajene Sidrap	34000	objek pajak	4,353,510,200	APBD		34000	objek pajak	3,687,424,000
5.02.04.2.0 1.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang ditetapkan	Pangkajene Sidrap								
5.02.04.2.0 1.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Waktu penyediaan layanan dan konsultasi pajak	Pangkajene Sidrap	12	bulan	71,497,000	APBD		12	bulan	66,311,500
5.02.04.2.0 1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang diteliti dan diverifikasi	Pangkajene Sidrap	7989	dok	11,960,700	APBD		7989	dok	9,824,000
5.02.04.2.0 1.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang tertagih	Pangkajene Sidrap	260000	wajib pajak	196,192,900	APBD		260000	wajib pajak	188,104,000
5.02.04.2.0 1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan pajak daerah	Pangkajene Sidrap	4	laporan	269,485,300	APBD		4	laporan	154,544,000
5.02.04.2.0 1.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan retribusi daerah	Pangkajene Sidrap	4	laporan	172,856,200	APBD		4	laporan	109,346,000
TOTAL						20,729,481,300					18,724,043,526

Kode	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDUKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDUKATIF
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
..01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Pangkajene Sidrap	100	persen	300,734,000	APBD		100%	100%	198,623,020
..01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan STNK Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pangkajene Sidrap	26	Unit	130,526,000	APBD		26 Unit	26 Unit	154,749,920
..01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pangkajene Sidrap	2	Unit	130,000,000	APBD		2 Unit	2 Unit	19,400,000
..01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkajene Sidrap	50	unit	40,208,000	APBD		50 unit	50 unit	24,473,100
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah & retribusi daerah yang dikelola Bapenda	Pangkajene Sidrap	100	persen	7,915,395,500	APBD		100%	100%	4,961,888,000
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	Pangkajene Sidrap	100	persen	7,915,395,500	APBD		100%	100%	4,961,888,000
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah objek pajak baru yang terdata	Pangkajene Sidrap	200	objek pajak baru	37,512,000	APBD		200	objek pajak baru	50,444,000
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah perda / perbub yang tersusun	Pangkajene Sidrap	5	dok	154,488,000	APBD		5	dok	328,022,500
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah petugas & wajib pajak yang mendapat penyuluhan	Pangkajene Sidrap	100	orang	109,680,000	APBD		100	orang	63,272,000

Kode	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDUKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDUKATIF
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
..01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Tersedia	Pangkajene Sidrap	252	eksemplar	2,520,000	APBD		48 eksemplar	48 eksemplar	2,840,160
..01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangkajene Sidrap	60	Kali	458,816,000	APBD		100 Kali	100 Kali	158,748,260
..01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pangkajene Sidrap	100	%	32,015,000	APBD		100%	100%	150,728,300
..01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Pangkajene Sidrap	-		-					
..01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan	Pangkajene Sidrap	30	Unit	20,190,000	APBD		30 Unit	30 Unit	41,543,160
..01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkajene Sidrap	1	Unit	-	APBD		1 Unit	1 Unit	-
..01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkajene Sidrap	15	Unit	11,825,000	APBD		19 Unit	19 Unit	109,185,140
..01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidrap	100	persen	1,350,497,400	APBD		12 bulan	12 bulan	1,542,933,360
..01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang bermaterai	Pangkajene Sidrap	250	lembar	3,996,000	APBD		400 lembar	400 lembar	3,874,180
..01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangkajene Sidrap	12	Bulan	160,000,000	APBD		12 Bulan	12 Bulan	171,293,220
..01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Pangkajene Sidrap	12	Bulan	1,186,501,400	APBD		12 Bulan	12 Bulan	1,367,765,960

Kode	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDUKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDUKATIF
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
..01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pangkajene Sidrap	4	Laporan	1,558,000	APBD		2	Laporan	1,663,550
..01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pangkajene Sidrap	1	Laporan	852,000	APBD		1	Laporan	1,257,120
..01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi penerimaan retribusi pasar	Pangkajene Sidrap	100	persen	367,952,300	APBD		92	92%	540,368,570
..01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi Daerah Yang Terdata dan Terdaftar	Pangkajene Sidrap	3937	objek retribusi	294,132,200	APBD		4133 Objek Retribusi	4133 Objek Retribusi	341,501,110
..01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	Pangkajene Sidrap	12	Bulan	23,410,700	APBD		12 Bulan	12 Bulan	6,128,460
..01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah SKRD Yang Dicitak	Pangkajene Sidrap	3937	Lembar	50,409,400	APBD		4133 Lembar	4133 Lembar	192,739,000
..01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Retribusi Daerah	Pangkajene Sidrap	-	-	-					-
..01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	Pangkajene Sidrap	100	persen	647,197,000	APBD		100%	100%	336,823,910
..01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	Pangkajene Sidrap	220	buah	9,131,400	APBD		300 buah	300 buah	14,650,050
..01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	Pangkajene Sidrap	440	Buah	12,969,000	APBD		380 Buah	380 Buah	12,610,000
..01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia	Pangkajene Sidrap	13900	Blok	163,760,600	APBD		13261 Blok	13261 Blok	147,975,440

TC.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDUKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDUKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
..01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pangkajene Sidrap	100	%	12,814,085,800		100	%	13,762,155,526
..01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Pangkajene Sidrap	100	persen	48,854,900	APBD	8.00	dokumen / laporan	42,447,200
..01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA, DPPA)	Pangkajene Sidrap	2	dokumen	25,317,000	APBD	2	dokumen	36,101,460
..01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renstra, Renja)	Pangkajene Sidrap	2	Laporan	21,375,900	APBD	2	Laporan	4,246,660
..01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan movev)	Pangkajene Sidrap	4	laporan	2,162,000	APBD	4	laporan	2,099,080
..01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	Pangkajene Sidrap	100	persen	10,066,835,200	APBD	4	laporan	10,093,266,130
..01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Pangkajene Sidrap	12	bulan	9,967,992,000	APBD	12	bulan	10,053,532,020
..01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu pelaksanaan administrasi tugas ASN	Pangkajene Sidrap	12	bulan	94,975,000	APBD	12	bulan	35,362,320
..01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pangkajene Sidrap	1	Laporan	1,458,200	APBD	1	Laporan	1,451,120

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 terdapat 2 program, 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi misi kepala daerah. Maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian sub kegiatan maka pada setiap sub kegiatan dirumuskan indicator kinerja sub kegiatan.

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 yang tertuang dalam Rencana Kerja ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dapat dilihat pada tabel TC.34

TC. 34

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDUKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	
..01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pangkajene Sidrap	100	%	12,814,085,800		
..01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Pangkajene Sidrap	100	persen	48,854,900	APBD	
..01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA, DPPA)	Pangkajene Sidrap	2	dokumen	25,317,000	APBD	
..01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renja, LKJip)	Pangkajene Sidrap	2	Laporan	21,375,900	APBD	
..01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan movev)	Pangkajene Sidrap	4	laporan	2,162,000	APBD	
..01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	Pangkajene Sidrap	100	persen	10,066,835,200	APBD	
..01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Pangkajene Sidrap	12	bulan	9,967,992,000	APBD	
..01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu pelaksanaan administrasi tugas ASN	Pangkajene Sidrap	12	bulan	94,975,000	APBD	
..01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pangkajene Sidrap	1	Laporan	1,458,200	APBD	
..01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pangkajene Sidrap	4	Laporan	1,558,000	APBD	
..01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pangkajene Sidrap	1	Laporan	852,000	APBD	
..01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi penerimaan retribusi pasar	Pangkajene Sidrap	100	persen	367,952,300	APBD	
..01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi Daerah Yang Terdata dan Terdaftar	Pangkajene Sidrap	3937	objek retribusi	294,132,200	APBD	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
..01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	Pangkajene Sidrap	12 Bulan	23,410,700	APBD	
..01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah SKRD Yang Dicitak	Pangkajene Sidrap	3937 Lembar	50,409,400	APBD	
..01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Retribusi Daerah	Pangkajene Sidrap				
..01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	Pangkajene Sidrap	100 persen	647,197,000	APBD	
..01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	Pangkajene Sidrap	220 buah	9,131,400	APBD	
..01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	Pangkajene Sidrap	440 Buah	12,969,000	APBD	
..01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia	Pangkajene Sidrap	13900 Blok	163,760,600	APBD	
..01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tersedia	Pangkajene Sidrap	252 eksemplar	2,520,000	APBD	
..01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangkajene Sidrap	60 Kali	458,816,000	APBD	
..01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pangkajene Sidrap	100 %	32,015,000	APBD	
..01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Pangkajene Sidrap	-	-		
..01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan	Pangkajene Sidrap	30 Unit	20,190,000	APBD	
..01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkajene Sidrap				
..01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkajene Sidrap	15 Unit	11,825,000	APBD	
..01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidrap	100 persen	1,350,497,400	APBD	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
..01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang bermaterai	Pangkajene Sidrap	250 lembar	3,996,000	APBD	
..01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangkajene Sidrap	12 Bulan	160,000,000	APBD	
..01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Pangkajene Sidrap	12 Bulan	1,186,501,400	APBD	
..01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Pangkajene Sidrap	100 persen	300,734,000	APBD	
..01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan STNK Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pangkajene Sidrap	26 Unit	130,526,000	APBD	
..01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pangkajene Sidrap	2 Unit	130,000,000	APBD	
..01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkajene Sidrap	50 unit	40,208,000	APBD	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah & retribusi daerah yang dikelola Bapenda	Pangkajene Sidrap	100 persen	7,915,395,500	APBD	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	Pangkajene Sidrap	100 persen	7,915,395,500	APBD	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah objek pajak baru yang terdata	Pangkajene Sidrap	200 objek pajak baru	37,512,000	APBD	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah perda / perbub yang tersusun	Pangkajene Sidrap	5 dok	154,488,000	APBD	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah petugas & wajib pajak yang mendapat penyuluhan	Pangkajene Sidrap	100 orang	109,680,000	APBD	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi yang tersedia	Pangkajene Sidrap	1 Aplikasi	2,428,885,000	APBD	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak daerah yang terdata dan terdaftar	Pangkajene Sidrap	7529 objek pajak	64,997,700	APBD	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDUKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5		6	7	8
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah aplikasi basis data pajak daerah yang dipelihara	Pangkajene Sidrap	2	paket	44,330,500	APBD	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak PBB dan BPHTB yang termutakhirkan datanya	Pangkajene Sidrap	34000	objek pajak	4,353,510,200	APBD	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang ditetapkan	Pangkajene Sidrap					
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Waktu penyediaan layanan dan konsultasi pajak	Pangkajene Sidrap	12	bulan	71,497,000	APBD	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang diteliti dan diverifikasi	Pangkajene Sidrap	7989	dok	11,960,700	APBD	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang tertagih	Pangkajene Sidrap	260000	wajib pajak	196,192,900	APBD	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan pajak daerah	Pangkajene Sidrap	4	laporan	269,485,300	APBD	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan retribusi daerah	Pangkajene Sidrap	4	laporan	172,856,200	APBD	
TOTAL						20,729,481,300		

BAB V PENUTUP


Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi. Di sisi lain, Rencana Kerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang akan menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi, meningkatkan koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan, mengoptimalkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, menyediakan alternatif kanal pembayaran pajak dan retribusi secara *online*

Semoga Penyusunan Renja ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja sasaran dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita-cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat.

Pangkajene Sidenreng, 8 Agustus 2022

/ KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG


/ MUH. YUSUF, SH., M.Kn
Pangkat : Pembina
Nip. 19820101 201101 1 006